



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.449, 2017

KEMENDAGRI. Hasil Pemetaan Urusan. Pemda
bidang PU-PR.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu ditetapkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal 1

- (1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan hasil validasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. melaksanakan penyusunan dan penetapan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran;

- b. melaksanakan penyusunan pelayanan fungsi pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- c. melakukan perubahan sistem informasi kelembagaan daerah.

Pasal 3

- (1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama dengan pemerintah daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 4

Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bagi pemerintah daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, mengikuti Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG
 HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
1	PROVINSI ACEH	810	BESAR
1.1	Kab. Aceh Barat	737	SEDANG
1.2	Kab. Aceh Besar	827	BESAR
1.3	Kab. Aceh Selatan	829	BESAR
1.4	Kab. Aceh Singkil	609	SEDANG
1.5	Kab. Aceh Tengah	737	SEDANG
1.6	Kab. Aceh Tenggara	684	SEDANG
1.7	Kab. Aceh Timur	834	BESAR
1.8	Kab. Aceh Utara	695	SEDANG
1.9	Kab. Bireuen	691	SEDANG
1.10	Kab. Pidie	684	SEDANG
1.11	Kab. Simeulue	756	SEDANG
1.12	Kota Banda Aceh	726	SEDANG
1.13	Kota Sabang	598	KECIL
1.14	Kota Langsa	759	SEDANG
1.15	Kota Lhokseumawe	671	SEDANG
1.16	Kab. Gayo Lues	715	SEDANG
1.17	Kab. Aceh Barat Daya	647	SEDANG
1.18	Kab. Aceh Jaya	660	SEDANG
1.19	Kab. Nagan Raya	730	SEDANG
1.20	Kab. Aceh Tamiang	801	BESAR
1.21	Kab. Bener Meriah	695	SEDANG
1.22	Kab. Pidie Jaya	598	KECIL
1.23	Kota Subulussalam	528	KECIL
2	PROVINSI SUMATERA UTARA	1065	BESAR
2.1	Kab. Asahan	664	SEDANG
2.2	Kab. Dairi	792	SEDANG
2.3	Kab. Deli Serdang	884	BESAR
2.4	Kab. Karo	781	SEDANG

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
2.5	Kab. Labuhan Batu	803	BESAR
2.6	Kab. Langkat	724	SEDANG
2.7	Kab. Mandailing Natal	770	SEDANG
2.8	Kab. Nias	739	SEDANG
2.9	Kab. Simalungun	308	SANGAT KECIL
2.10	Kab. Tapanuli Selatan	834	BESAR
2.11	Kab. Tapanuli Tengah	706	SEDANG
2.12	Kab. Tapanuli Utara	854	BESAR
2.13	Kab. Toba Samosir	836	BESAR
2.14	Kota Binjai	603	SEDANG
2.15	Kota Medan	957	BESAR
2.16	Kota Pematang Siantar	741	SEDANG
2.17	Kota Sibolga	354	SANGAT KECIL
2.18	Kota Tanjung Balai	700	SEDANG
2.19	Kota Tebing Tinggi	339	KECIL
2.20	Kota Padang Sidempuan	469	KECIL
2.21	Kab. Pakpak Bharat	722	SEDANG
2.22	Kab. Nias Selatan	671	SEDANG
2.23	Kab. Humbang Hasundutan	693	SEDANG
2.24	Kab. Serdang Bedagai	750	SEDANG
2.25	Kab. Samosir	660	SEDANG
2.26	Kab. Batu Bara	656	SEDANG
2.27	Kab. Padang Lawas	354	KECIL
2.28	Kab. Padang Lawas Utara	838	BESAR
2.29	Kab. Labuhan Batu Selatan	711	SEDANG
2.30	Kab. Labuhan Batu Utara	675	SEDANG
2.31	Kab. Nias Utara	-	*) Tidak terpetakan
2.32	Kab. Nias Barat	692	SEDANG
2.33	Kota Gunung Sitoli	711	SEDANG
3	PROVINSI SUMATERA BARAT	975	BESAR
3.1	Kab. Lima Puluh Kota	814	BESAR
3.2	Kab. Agam	814	BESAR
3.3	Kab. Kepulauan Mentawai	918	BESAR
3.4	Kab. Padang Pariaman	810	BESAR
3.5	Kab. Pasaman	722	SEDANG
3.6	Kab. Pesisir Selatan	893	BESAR
3.7	Kab. Sijunjung	629	SEDANG
3.8	Kab. Solok	801	BESAR
3.9	Kab. Tanah Datar	823	BESAR
3.10	Kota Bukit Tinggi	576	KECIL
3.11	Kota Padang Panjang	304	SANGAT KECIL
3.12	Kota Padang	801	BESAR

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
3.13	Kota Payakumbuh	656	SEDANG
3.14	Kota Sawahlunto	524	KECIL
3.15	Kota Solok	444	KECIL
3.16	Kota Pariaman	416	KECIL
3.17	Kab. Pasaman Barat	697	SEDANG
3.18	Kab. Dharmasraya	708	SEDANG
3.19	Kab. Solok Selatan	565	KECIL
4	PROVINSI RIAU	900	BESAR
4.1	Kab. Bengkalis	816	BESAR
4.2	Kab. Indragiri Hilir	774	SEDANG
4.3	Kab. Indragiri Hulu	834	BESAR
4.4	Kab. Kampar	933	BESAR
4.5	Kab. Kuantan Singingi	660	SEDANG
4.6	Kab. Pelalawan	834	BESAR
4.7	Kab. Rokan Hilir	290	SANGAT KECIL
4.8	Kab. Rokan Hulu	717	SEDANG
4.9	Kab. Siak	865	BESAR
4.10	Kota Dumai	768	SEDANG
4.11	Kota Pekanbaru	854	BESAR
4.12	Kab. Kepulauan Meranti	748	SEDANG
5	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	790	SEDANG
5.1	Kab. Natuna	732	SEDANG
5.2	Kab. Kep. Anambas	490	KECIL
5.3	Kab. Karimun	689	SEDANG
5.4	Kota Batam	1134	BESAR
5.5	Kota Tanjung Pinang	702	SEDANG
5.6	Kab. Lingga	734	SEDANG
5.7	Kab. Bintan	720	SEDANG
6	PROVINSI JAMBI	620	SEDANG
6.1	Kab. Batanghari	735	SEDANG
6.2	Kab. Bungo	788	SEDANG
6.3	Kab. Kerinci	680	SEDANG
6.4	Kab. Merangin	832	BESAR
6.5	Kab. Muaro Jambi	530	KECIL
6.6	Kab. Sarolangun	810	BESAR
6.7	Kab. Tanjung Jabung Barat	816	BESAR
6.8	Kab. Tanjung Jabung Timur	832	BESAR
6.9	Kab. Tebo	873	BESAR
6.10	Kota Jambi	796	SEDANG
6.11	Kota Sungai Penuh	546	KECIL
7	PROVINSI SUMATERA SELATAN	1065	BESAR
7.1	Kab. Lahat	724	SEDANG

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
7.2	Kab. Musi Banyuasin	829	BESAR
7.3	Kab. Musi Rawas	979	BESAR
7.4	Kab. Muara Enim	860	BESAR
7.5	Kab. Ogan Komering Ilir	937	BESAR
7.6	Kab. Ogan Komering Ulu	796	SEDANG
7.7	Kota Palembang	821	BESAR
7.8	Kota Pagar Alam	594	KECIL
7.9	Kota Lubuk Linggau	691	SEDANG
7.10	Kota Prabumulih	568	KECIL
7.11	Kab. Banyuasin	959	BESAR
7.12	Kab. Ogan Ilir	814	BESAR
7.13	Kab. OKU Timur	669	SEDANG
7.14	Kab. OKU Selatan	651	SEDANG
7.15	Kab. Empat Lawang	724	SEDANG
7.16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	821	BESAR
7.17	Kab. Musi Rawas Utara	728	SEDANG
8	PROVINSI BANGKA BELITUNG	997	BESAR
8.1	Kab. Bangka	930	BESAR
8.2	Kab. Belitung	790	SEDANG
8.3	Kota Pangkal Pinang	455	KECIL
8.4	Kab. Bangka Selatan	874	BESAR
8.5	Kab. Bangka Tengah	669	SEDANG
8.6	Kab. Bangka Barat	960	BESAR
8.7	Kab. Belitung Timur	725	SEDANG
9	PROVINSI BENGKULU	766	SEDANG
9.1	Kab. Bengkulu Selatan	673	SEDANG
9.2	Kab. Bengkulu Utara	660	SEDANG
9.3	Kab. Rejang Lebong	634	SEDANG
9.4	Kota Bengkulu	752	SEDANG
9.5	Kab. Kaur	618	SEDANG
9.6	Kab. Seluma	664	SEDANG
9.7	Kab. Mukomuko	682	SEDANG
9.8	Kab. Lebong	618	SEDANG
9.9	Kab. Kepahiang	653	SEDANG
9.10	Kab. Bengkulu Tengah	638	SEDANG
10	PROVINSI LAMPUNG	900	BESAR
10.1	Kab. Lampung Barat	834	BESAR
10.2	Kab. Lampung Selatan	882	BESAR
10.3	Kab. Lampung Tengah	977	BESAR
10.4	Kab. Lampung Utara	836	BESAR
10.5	Kab. Lampung Timur	865	BESAR
10.6	Kab. Tanggamus	814	BESAR

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
10.7	Kab. Tulang Bawang	816	BESAR
10.8	Kab. Way Kanan	920	BESAR
10.9	Kota Bandar Lampung	794	SEDANG
10.10	Kota Metro	471	KECIL
10.11	Kab. Pesawaran	752	SEDANG
10.12	Kab. Pringsewu	794	SEDANG
10.13	Kab. Mesuji	741	SEDANG
10.14	Kab. Tulang Bawang Barat	761	SEDANG
10.15	Kab. Pesisir Barat	722	SEDANG
11	PROVINSI JAWA BARAT	982	BESAR
11.1	Kab. Bandung	844	BESAR
11.2	Kab. Bekasi	816	BESAR
11.3	Kab. Bogor	864	BESAR
11.4	Kab. Ciamis	780	SEDANG
11.5	Kab. Cianjur	802	BESAR
11.6	Kab. Cirebon	814	BESAR
11.7	Kab. Garut	888	BESAR
11.8	Kab. Indramayu	814	BESAR
11.9	Kab. Karawang	722	SEDANG
11.10	Kab. Kuningan	794	SEDANG
11.11	Kab. Majalengka	848	BESAR
11.12	Kab. Purwakarta	728	SEDANG
11.13	Kab. Subang	820	BESAR
11.14	Kab. Sukabumi	788	SEDANG
11.15	Kab. Sumedang	844	BESAR
11.16	Kab. Tasikmalaya	812	BESAR
11.17	Kota Bandung	834	BESAR
11.18	Kota Bekasi	812	BESAR
11.19	Kota Bogor	651	SEDANG
11.20	Kota Cirebon	460	KECIL
11.21	Kota Depok	843	BESAR
11.22	Kota Sukabumi	343	SANGAT KECIL
11.23	Kota Cimahi	411	KECIL
11.24	Kota Tasikmalaya	827	BESAR
11.25	Kota Banjar	495	KECIL
11.26	Kab. Bandung Barat	638	SEDANG
11.27	Kab. Pangandaran	528	KECIL
12	PROVINSI BANTEN	758	SEDANG
12.1	Kab. Lebak	792	SEDANG
12.2	Kab. Pandeglang	652	SEDANG
12.3	Kab. Serang	772	SEDANG
12.4	Kab. Tangerang	790	SEDANG

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
12.5	Kota Cilegon	543	KECIL
12.6	Kota Tangerang	832	BESAR
12.7	Kota Serang	623	SEDANG
12.8	Kota Tangerang Selatan	979	BESAR
13	PROVINSI JAWA TENGAH	968	BESAR
13.1	Kab. Banjarnegara	680	SEDANG
13.2	Kab. Banyumas	874	BESAR
13.3	Kab. Batang	660	SEDANG
13.4	Kab. Blora	780	SEDANG
13.5	Kab. Boyolali	708	SEDANG
13.6	Kab. Brebes	766	SEDANG
13.7	Kab. Cilacap	954	BESAR
13.8	Kab. Demak	590	KECIL
13.9	Kab. Grobogan	800	SEDANG
13.10	Kab. Jepara	750	SEDANG
13.11	Kab. Karanganyar	804	BESAR
13.12	Kab. Kebumen	794	SEDANG
13.13	Kab. Kendal	730	SEDANG
13.14	Kab. Klaten	702	SEDANG
13.15	Kab. Kudus	696	SEDANG
13.16	Kab. Magelang	808	BESAR
13.17	Kab. Pati	782	SEDANG
13.18	Kab. Pekalongan	614	SEDANG
13.19	Kab. Pemasang	718	SEDANG
13.20	Kab. Purbalingga	662	SEDANG
13.21	Kab. Purworejo	814	BESAR
13.22	Kab. Rembang	652	SEDANG
13.23	Kab. Semarang	648	SEDANG
13.24	Kab. Sragen	774	SEDANG
13.25	Kab. Sukoharjo	754	SEDANG
13.26	Kab. Tegal	816	BESAR
13.27	Kab. Temanggung	650	SEDANG
13.28	Kab. Wonogiri	772	SEDANG
13.29	Kab. Wonosobo	778	SEDANG
13.30	Kota Magelang	337	SANGAT KECIL
13.31	Kota Pekalongan	436	KECIL
13.32	Kota Salatiga	486	KECIL
13.33	Kota Semarang	970	BESAR
13.34	Kota Surakarta	614	SEDANG
13.35	Kota Tegal	689	SEDANG
14	PROVINSI DI YOGYAKARTA	-	TIDAK TERPETAKAN

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
14.1	Kab. Bantul	626	SEDANG
14.2	Kab. Gunung Kidul	640	SEDANG
14.3	Kab. Kulon Progo	720	SEDANG
14.4	Kab. Sleman	716	SEDANG
14.5	Kota Yogyakarta	640	SEDANG
15	PROVINSI JAWA TIMUR	988	BESAR
15.1	Kab. Bangkalan	898	BESAR
15.2	Kab. Banyuwangi	514	KECIL
15.3	Kab. Blitar	852	BESAR
15.4	Kab. Bojonegoro	954	BESAR
15.5	Kab. Bondowoso	802	BESAR
15.6	Kab. Gresik	714	SEDANG
15.7	Kab. Jember	946	BESAR
15.8	Kab. Jombang	804	BESAR
15.9	Kab. Kediri	852	BESAR
15.10	Kab. Lamongan	756	SEDANG
15.11	Kab. Lumajang	698	SEDANG
15.12	Kab. Madiun	802	BESAR
15.13	Kab. Magetan	690	SEDANG
15.14	Kab. Malang	976	BESAR
15.15	Kab. Mojokerto	748	SEDANG
15.16	Kab. Nganjuk	692	SEDANG
15.17	Kab. Ngawi	854	BESAR
15.18	Kab. Pacitan	656	SEDANG
15.19	Kab. Pamekasan	638	SEDANG
15.20	Kab. Pasuruan	968	BESAR
15.21	Kab. Ponorogo	776	SEDANG
15.22	Kab. Probolinggo	950	BESAR
15.23	Kab. Sampang	688	SEDANG
15.24	Kab. Sidoarjo	810	BESAR
15.25	Kab. Situbondo	854	BESAR
15.26	Kab. Sumenep	952	BESAR
15.27	Kab. Trenggalek	744	SEDANG
15.28	Kab. Tuban	834	BESAR
15.29	Kab. Tulungagung	862	BESAR
15.30	Kota Blitar	601	SEDANG
15.31	Kota Kediri	854	BESAR
15.32	Kota Madiun	724	SEDANG
15.33	Kota Malang	678	SEDANG
15.34	Kota Mojokerto	332	SANGAT KECIL
15.35	Kota Pasuruan	625	SEDANG
15.36	Kota Probolinggo	682	SEDANG

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
15.37	Kota Surabaya	979	BESAR
15.38	Kota Batu	627	SEDANG
16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	825	BESAR
16.1	Kab. Bengkayang	750	SEDANG
16.2	Kab. Landak	759	SEDANG
16.3	Kab. Kapuas Hulu	1.008	BESAR
16.4	Kab. Ketapang	832	BESAR
16.5	Kab. Mempawah	785	SEDANG
16.6	Kab. Sambas	1.033	BESAR
16.7	Kab. Sanggau	838	BESAR
16.8	Kab. Sintang	884	BESAR
16.9	Kota Pontianak	766	SEDANG
16.10	Kota Singkawang	616	SEDANG
16.11	Kab. Sekadau	794	SEDANG
16.12	Kab. Melawi	697	SEDANG
16.13	Kab. Kayong Utara	717	SEDANG
16.14	Kab. Kubu Raya	840	BESAR
17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	664	SEDANG
17.1	Kab. Barito Selatan	733	SEDANG
17.2	Kab. Barito Utara	629	SEDANG
17.3	Kab. Kapuas	847	BESAR
17.4	Kab. Kotawaringin Barat	825	BESAR
17.5	Kab. Kotawaringin Timur	834	BESAR
17.6	Kota Palangkaraya	854	BESAR
17.7	Kab. Katingan	933	BESAR
17.8	Kab. Seruyan	871	BESAR
17.9	Kab. Sukamara	563	KECIL
17.10	Kab. Lamandau	752	SEDANG
17.11	Kab. Gunung Mas	834	BESAR
17.12	Kab. Pulang Pisau	810	BESAR
17.13	Kab. Murung Raya	770	SEDANG
17.14	Kab. Barito Timur	708	SEDANG
18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	957	BESAR
18.1	Kab. Banjar	942	BESAR
18.2	Kab. Barito Kuala	590	KECIL
18.3	Kab. Hulu Sungai Selatan	774	SEDANG
18.4	Kab. Hulu Sungai Tengah	761	SEDANG
18.5	Kab. Hulu Sungai Utara	979	BESAR
18.6	Kab. Kota Baru	926	BESAR
18.7	Kab. Tabalong	816	BESAR
18.8	Kab. Tanah Laut	737	SEDANG
18.9	Kab. Tapin	680	SEDANG

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
18.10	Kota Banjar Baru	807	BESAR
18.11	Kota Banjarmasin	867	BESAR
18.12	Kab. Balangan	629	SEDANG
18.13	Kab. Tanah Bumbu	823	BESAR
19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	946	BESAR
19.1	Kab. Kutai Kartanegara	856	BESAR
19.2	Kab. Kutai Barat	678	SEDANG
19.3	Kab. Kutai Timur	851	BESAR
19.4	Kab. Paser	638	SEDANG
19.5	Kota Balikpapan	801	BESAR
19.6	Kota Bontang	644	SEDANG
19.7	Kota Samarinda	827	BESAR
19.8	Kab. Berau	860	BESAR
19.9	Kab. Penajam Paser Utara	814	BESAR
19.10	Kab. Mahakam Ulu	583	KECIL
20	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	829	BESAR
20.1	Kab. Bulungan	768	SEDANG
20.2	Kab. Malinau	633	SEDANG
20.3	Kab. Nunukan	767	SEDANG
20.4	Kab. Tarakan	744	SEDANG
20.5	Kab. Tana Tidung	284	SANGAT KECIL
21	PROVINSI SULAWESI UTARA	1142	BESAR
21.1	Kab. Bolaang Mongondow	557	KECIL
21.2	Kab. Minahasa	620	SEDANG
21.3	Kab. Kepulauan Sangihe	798	SEDANG
21.4	Kota Bitung	724	SEDANG
21.5	Kota Manado	656	SEDANG
21.6	Kab. Kepulauan Talaud	518	KECIL
21.7	Kab. Minahasa Selatan	805	BESAR
21.8	Kota Tomohon	455	KECIL
21.9	Kab. Minahasa Utara	686	SEDANG
21.10	Kota Kotamobagu	583	KECIL
21.11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	695	SEDANG
21.12	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bitaro	624	SEDANG
21.13	Kab. Minahasa Tenggara	667	SEDANG
21.14	Kab. Bolaang Mangondow Timur	694	SEDANG
21.15	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	557	KECIL
22	PROVINSI GORONTALO	568	KECIL
22.1	Kab. Boalemo	750	SEDANG
22.2	Kab. Gorontalo	823	BESAR
22.3	Kota Gorontalo	484	KECIL

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
22.4	Kab. Pohuwato	667	SEDANG
22.5	Kab. Bone Bolango	407	KECIL
22.6	Kab. Gorontalo Utara	792	SEDANG
23	PROVINSI SULAWESI TENGAH	827	BESAR
23.1	Kab. Banggai	915	BESAR
23.2	Kab. Banggai Kepulauan	284	SANGAT SANGAT KECIL
23.3	Kab. Buol	700	SEDANG
23.4	Kab. Toli-Toli	834	BESAR
23.5	Kab. Donggala	680	SEDANG
23.6	Kab. Morowali	711	SEDANG
23.7	Kab. Poso	647	SEDANG
23.8	Kota Palu	755	SEDANG
23.9	Kab. Parigi Moutong	957	BESAR
23.10	Kab. Tojo Una Una	810	BESAR
23.11	Kab. Sigi	695	SEDANG
23.12	Kab. Banggai Laut	464	KECIL
23.13	Kab. Morowali Utara	726	SEDANG
24	PROVINSI SULAWESI SELATAN	1012	BESAR
24.1	Kab. Bantaeng	834	BESAR
24.2	Kab. Barru	796	SEDANG
24.3	Kab. Bone	994	BESAR
24.4	Kab. Bulukumba	953	BESAR
24.5	Kab. Enrekang	669	SEDANG
24.6	Kab. Gowa	880	BESAR
24.7	Kab. Jeneponto	807	BESAR
24.8	Kab. Luwu	845	BESAR
24.9	Kab. Luwu Utara	821	BESAR
24.10	Kab. Maros	772	SEDANG
24.11	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.019	BESAR
24.12	Kota Palopo	845	BESAR
24.13	Kab. Luwu Timur	812	BESAR
24.14	Kab. Pinrang	977	BESAR
24.15	Kab. Sinjai	774	SEDANG
24.16	Kab. Kepulauan Selayar	1.036	BESAR
24.17	Kab. Sidenreng Rappang	981	BESAR
24.18	Kab. Soppeng	847	BESAR
24.19	Kab. Takalar	783	SEDANG
24.20	Kab. Tana Toraja	832	BESAR
24.21	Kab. Wajo	979	BESAR
24.22	Kota Pare-pare	594	KECIL
24.23	Kota Makassar	979	BESAR

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
24.24	Kab. Toraja Utara	854	BESAR
25	PROVINSI SULAWESI BARAT	636	SEDANG
25.1	Kab. Majene	829	BESAR
25.2	Kab. Mamuju	816	BESAR
25.3	Kab. Polewali Mandar	803	BESAR
25.4	Kab. Mamasa	772	SEDANG
25.5	Kab. Mamuju Utara	816	BESAR
25.6	Kab. Mamuju Tengah	473	KECIL
26	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	980	SEDANG
26.1	Kab. Buton	713	SEDANG
26.2	Kab. Konawe	739	SEDANG
26.3	Kab. Kolaka	873	BESAR
26.4	Kab. Muna	832	BESAR
26.5	Kota Kendari	662	SEDANG
26.6	Kota Bau-bau	772	SEDANG
26.7	Kab. Konawe Selatan	805	BESAR
26.8	Kab. Bombana	715	SEDANG
26.9	Kab. Wakatobi	655	SEDANG
26.10	Kab. Kolaka Utara	642	SEDANG
26.11	Kab. Konawe Utara	559	KECIL
26.12	Kab. Buton Utara	559	KECIL
26.13	Kab. Konawe Kepulauan	664	SEDANG
26.14	Kab. Kolaka Timur	772	SEDANG
26.15	Kab. Muna Barat	773	SEDANG
26.16	Kab. Buton Tengah	515	KECIL
26.17	Kab. Buton Selatan	713	SEDANG
27	PROVINSI BALI	694	SEDANG
27.1	Kab. Badung	718	SEDANG
27.2	Kab. Bangli	716	SEDANG
27.3	Kab. Buleleng	714	SEDANG
27.4	Kab. Gianyar	740	SEDANG
27.5	Kab. Jembrana	736	SEDANG
27.6	Kab. Karangasem	804	BESAR
27.7	Kab. Klungkung	640	SEDANG
27.8	Kab. Tabanan	636	SEDANG
27.9	Kota Denpasar	774	SEDANG
28	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1019	BESAR
28.1	Kab. Bima	782	SEDANG
28.2	Kab. Dompu	754	SEDANG
28.3	Kab. Lombok Barat	658	SEDANG
28.4	Kab. Lombok Tengah	838	BESAR
28.5	Kab. Lombok Timur	826	BESAR

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
28.6	Kab. Sumbawa	886	BESAR
28.7	Kota Mataram	447	KECIL
28.8	Kota Bima	499	KECIL
28.9	Kab. Sumbawa Barat	886	BESAR
28.10	Kab. Lombok Utara	581	KECIL
29	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1070	BESAR
29.1	Kab. Alor	1.081	BESAR
29.2	Kab. Belu	745	SEDANG
29.3	Kab. Ende	878	BESAR
29.4	Kab. Flores Timur	617	SEDANG
29.5	Kab. Kupang	838	BESAR
29.6	Kab. Lembata	631	SEDANG
29.7	Kab. Manggarai	780	SEDANG
29.8	Kab. Ngada	818	BESAR
29.9	Kab. Sikka	838	BESAR
29.10	Kab. Sumba Barat	802	BESAR
29.11	Kab. Sumba Timur	883	BESAR
29.12	Kab. Timor Tengah Selatan	900	BESAR
29.13	Kab. Timor Tengah Utara	790	SEDANG
29.14	Kota Kupang	642	SEDANG
29.15	Kab. Rote Ndao	605	SEDANG
29.16	Kab. Manggarai Barat	902	BESAR
29.17	Kab. Nagekeo	835	BESAR
29.18	Kab. Sumba Barat Daya	871	BESAR
29.19	Kab. Sumba Tengah	913	BESAR
29.20	Kab. Manggarai Timur	804	BESAR
29.21	Kab. Sabu Raijua	564	KECIL
29.22	Kab. Malaka	766	SEDANG
30	PROVINSI MALUKU	918	BESAR
30.1	Kab. Maluku Tenggara Barat	196	SANGAT KECIL
30.2	Kab. Maluku Tengah	983	BESAR
30.3	Kab. Maluku Tenggara	630	SEDANG
30.4	Kab. Buru	847	BESAR
30.5	Kota Ambon	579	KECIL
30.6	Kab. Seram Bagian Barat	478	KECIL
30.7	Kab. Seram Bagian Timur	-	*) Tidak terpetakan
30.8	Kab. Kepulauan Aru	681	SEDANG
30.9	Kota Tual	577	KECIL
30.10	Kab. Maluku Barat Daya	782	SEDANG
30.11	Kab. Buru Selatan	694	SEDANG
31	PROVINSI MALUKU UTARA	795	SEDANG
31.1	Kab. Halmahera Tengah	792	SEDANG

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
31.2	Kota Ternate	484	KECIL
31.3	Kab. Halmahera Barat	612	SEDANG
31.4	Kab. Halmahera Timur	557	KECIL
31.5	Kab. Halmahera Selatan	919	BESAR
31.6	Kab. Halmahera Utara	552	KECIL
31.7	Kab. Kepulauan Sula	643	SEDANG
31.8	Kota. Tidore Kepulauan	686	SEDANG
31.9	Kab. Pulau Morotai	612	SEDANG
31.10	Kab. Pulau Taliabu	761	SEDANG
32	PROVINSI PAPUA	-	TIDAK TERPETAKAN
32.1	Kab. Biak Numfor	809	BESAR
32.2	Kab. Jayapura	890	BESAR
32.3	Kab. Jayawijaya	890	BESAR
32.4	Kab. Merauke	1086	BESAR
32.5	Kab. Mimika	916	BESAR
32.6	Kab. Nabire	1.095	BESAR
32.7	Kab. Paniai	-	*) Tidak terpetakan
32.8	Kab. Puncak Jaya	-	*) Tidak terpetakan
32.9	Kab. Kepulauan Yapen	-	*) Tidak terpetakan
32.10	Kota Jayapura	720	SEDANG
32.11	Kab. Sarmi	843	BESAR
32.12	Kab. Keerom	809	BESAR
32.13	Kab. Yahukimo	837	BESAR
32.14	Kab. Pegunungan Bintang	720	SEDANG
32.15	Kab. Tolikara	820	BESAR
32.16	Kab. Boven Digoel	846	BESAR
32.17	Kab. Mappi	728	SEDANG
32.18	Kab. Asmat	874	BESAR
32.19	Kab. Waropen	619	SEDANG
32.20	Kab. Supiori	-	*) Tidak terpetakan
32.21	Kab. Mamberamo Raya	-	*) Tidak terpetakan
32.22	Kab. Membramo Tengah	-	*) Tidak terpetakan
32.23	Kab. Yalimo	-	*) Tidak terpetakan
32.24	Kab. Lanny Jaya	602	SEDANG
32.25	Kab. Nduga	543	KECIL
32.26	Kab. Dogiyai	529	KECIL
32.27	Kab. Puncak	-	*) Tidak terpetakan
32.28	Kab. Intan Jaya	-	*) Tidak terpetakan
32.29	Kab. Deiyai	-	*) Tidak terpetakan
33	PROVINSI PAPUA BARAT	1.095	BESAR
33.1	Kab. Fak Fak	949	BESAR

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
33.2	Kab. Manokwari	196	SANGAT SANGAT KECIL
33.3	Kab. Sorong	854	BESAR
33.4	Kota Sorong	1.008	BESAR
33.5	Kab. Raja Ampat	767	SEDANG
33.6	Kab. Sorong Selatan	-	*) Tidak terpetakan
33.7	Kab. Teluk Bintuni	168	SANGAT SANGAT KECIL
33.8	Kab. Teluk Wondama	154	SANGAT SANGAT KECIL
33.9	Kab. Kaimana	678	SEDANG
33.10	Kab. Maybrat	426	KECIL
33.11	Kab. Tambrauw	-	*) Tidak terpetakan
33.12	Kab. Manokwari Selatan	456	KECIL
33.13	Kab. Pegunungan Arfak	-	*) Tidak terpetakan
34	PROVINSI DKI JAKARTA	896	BESAR
34.1	Kota Jakarta Pusat	2	**) Nihil (Urusan Pilihan)
34.2	Kota Jakarta Timur	2	**) Nihil (Urusan Pilihan)
34.3	Kota Jakarta Selatan	2	**) Nihil (Urusan Pilihan)
34.4	Kota Jakarta Barat	2	**) Nihil (Urusan Pilihan)
34.5	Kota Jakarta Utara	2	**) Nihil (Urusan Pilihan)
34.6	Kab. Kepulauan Seribu	2	**) Nihil (Urusan Pilihan)

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO